

# Ekonomi Nelayan Batubara Samakin Terpuruk

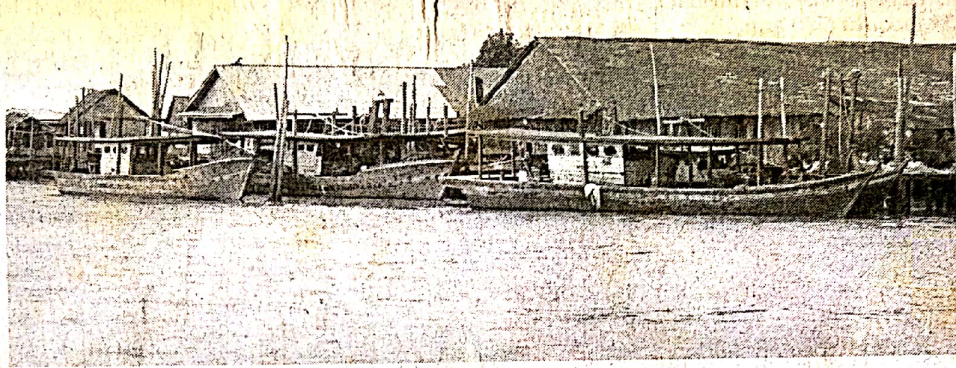
KEHIDUPAN ribuan nelayan kecil di Kab.

Batubara kembali terpuruk menyusul beroperasinya lagi pukat grandong.

Ironisnya, alat tangkap itu bukan hanya berasal dari Kuala Batubara, tapi paling banyak dari luar daerah, seperti Kab. Asahan dan Kota Tanjungbalai.

Para nelayan sama sekali tidak mampu menghalau kehadiran alat tangkap yang sangat merusak habitat di laut itu. Apalagi pada malam hari, operasi alat tangkap itu sampai-sampai ke pinggir pantai, yang merupakan kawasan penangkapan nelayan kecil. Akibatnya nelayan sering menjadi korban pukat grandong, bukan hanya dari sisi penghasilan, tapi juga jaring yang sedang mereka tebar di laut selalu digilas alat tanggap tersebut.

Operasi alat tangkap grandong (tarik) dua seperti mendapat lampu hijau aparat di Pemkab Batubara itu. Para nahkoda pukat grandong beroperasi non stop 24 jam secara berkonvoi tanpa memerhatikan keberadaan nelayan kecil. Bahkan Anak Buah Kapal (ABK) grandong jika berpapasan sering memancing emosi nelayan skala kecil, dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Dalam rentang waktu 24 jam, puluhan ton ikan dari berbagai jenis dan



Waspada / Erwan Efendi

*PUKAT grandong yang merusak ekonomi nelayan skala kecil sedang bertambat beberapa puluh meter dari pos keamanan laut Tanjungtiram.*

ukuran 'dikuras' pukat grandong tanpa mendapat pengawasan pihak berwajib.

Sebenarnya sudah ada perjanjian antara nelayan skala kecil dengan pengusaha pukat grandong yang diprakerasai Pemkab Batubara dalam hal ini Diskanal, Ops Lanal, Polair yang langsung dihadiri kapolres Batubara AKBP JP. Sinaga, Camat Tanjungtiram dan Talawi setelah terjadi beberapa peristiwa. Dalam perjanjian itu antara lain telah disepakati bahwa pukat grandong tidak boleh lagi beroperasi karena melanggar Keputusan Menteri Kelautan No.2 Tahun 2011 tentang jenis alat tangkap. Namun, pengusaha pukat grandong mengabaikan perjanjian itu. Mereka kembali beroperasi.

Anehnya, Pemkab Batubara dan pihak keamanan laut tenang-tenang saja melihat kejadian

ini. Hal tersebut membuat nelayan apatis yang pada gilirannya menimbulkan rasa tidak percaya lagi terhadap fungsi dan tanggungjawab Pemkab dan pihak keamanan laut di Batubara. Tidak heran kalau nelayan terpaksa harus mengambil kebijakan sendiri. Yakni turun ke laut menangkap keberadaan pukat ilegal itu.

Jadi, tidak pantas pula jika tindakan sepihak nelayan itu sepenuhnya disalahkan kepada mereka. Karena yang mereka lakukan merupakan akibat dari ketidakpedulian Pemkab dan pihak keamanan laut.

## Tak Punya Konsep

Pemkab Batubara dinilai tidak memiliki konsep yang jelas dan berkesinambungan untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan nelayan agar dapat hidup layak. Kalaupun

ada konsep atau gagasan, semua itu hanya dalam bentuk wacana, tidak sampai pada bentuk kegiatan. Contohnya, seperti keinginan bupati menjadikan perairan Batubara sebagai kolam bagi para nelayan. Sedihnya, komunitas nelayan selalu menjadi obyek bagi kepentingan oknum pejabat di Pemkab Batubara.

Ketidakcerdasan Pemkab Batubara dalam mengelola dan memanfaatkan serta menata sumber daya manusia dan sumber daya kelautan itulah merupakan salah satu faktor penyebab semakin sulitnya kehidupan nelayan di Batubara. Kehidupan nelayan di kawasan itu seperti dihimpit batu besar yang sulit diangkat. Padahal, jika saja bupati memiliki niat baik, tulus dan ikhlas disertai kerja keras dengan tim yang kompak dan kuat, batu besar yang

menghimpit kehidupan nelayan itu akan mudah diangkat dan Batubara akat bangkit.

Bupati sebagai penguasa tunggal di daerah memiliki hak dan wewenang membuat dan mengatur anggaran untuk membangun masyarakat nelayan. Dalam konteks ini lah seorang pemimpin diuji kemampuan serta keberpihakannya, apakah mengutamakan kepentingan masyarakat atau pribadi serta kelompok. Apakah hanya mampu menjual sejumlah konsep sementara aplikasinya hanya setetes, sehingga kehidupan nelayan tak pernah bangkit.

Sementara pihak keamanan laut selaku institusi yang bertanggungjawab dalam menciptakan keamanan dan kondusifitas di laut harus bertindak tegas demi menegakan peraturan, dan melindungi sumber ekonomi nelayan skala kecil tanpa pilih kasih. Kini nelayan di Batubara mengelukan pihak keamanan laut, karena tidak bersikap tegas. Bahkan sebaliknya, terkesan memberi "semangat" kepada pengusaha grandong untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Ke depan jangan ada pejabat yang tidak peduli terhadap kehidupan ekonomi nelayan di Batubara. Karena Batubara ke depan akan bangkit. Sebab, jika pejabat tidak punya kepedulian ekonomi, keadaan Batubara akan semakin terpuruk karena tidak akan bangkit. \*Erwan Efendi